

Mengukur Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh: Peran Varian Anggaran dan SiLPA Tahun 2018-2022

Endra Gunawan¹, Muhammad Ridha Ramli², T. Zulfan³, Maisarah⁴, Sumidawati⁵

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sabang
endragunawanr@gmail.com

Abstract

This study aims to measure the performance of local government budgets in the districts/cities of Aceh by analyzing the influence of budget variance and the Surplus of Budget Calculation (SiLPA) on budget performance. The research uses a quantitative approach with panel regression analysis to examine the relationship between independent and dependent variables. The data used is secondary data from the Regional Financial Realization Reports for the period 2018-2022 across 23 districts/cities in Aceh. The results show that both budget variance and SiLPA significantly affect budget performance. Overall, the regression model used has an R-squared value of 0.79, indicating that the variation in budget performance can be explained by the variables employed in this study. In conclusion, effective management of budget variance and SiLPA can improve local government budget performance in Aceh, ultimately supporting more optimal regional development implementation.

Keywords: Budget Performance, Budget Variance, SiLPA, Local Government Aceh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Aceh dengan menganalisis pengaruh varians anggaran belanja dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi panel yang menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Keuangan daerah periode 2018-2022 di 23 Kabupaten/Kota Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran belanja dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan memiliki nilai R-squared sebesar 0.79, yang menunjukkan bahwa variasi kinerja anggaran dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, pengelolaan varians anggaran dan SiLPA yang efektif dapat meningkatkan kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kata Kunci : Kinerja Anggaran, Varians Anggaran Belanja, SiLPA, Pemerintah Daerah Aceh



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. CC-BY license
E-ISSN: 2598-3008, P-ISSN:2355-0465 DOI: 10.36083/si-men.vxxix

PENDAHULUAN

Anggaran belanja pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, tetapi ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi sering kali menimbulkan masalah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, yang pada mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Callahan & Waymire, 2007; Aminah &

Lindrianasari, 2013). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan anggaran adalah varian anggaran belanja, yang mengacu pada selisih antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, karena dapat mempengaruhi struktur anggaran di tahun berikutnya (Ramadanti, 2019).

Fenomena varian anggaran belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan merupakan salah satu indikator adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya daerah yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan daerah (Abdullah, 2012b). Ketidaktepatan anggaran ini sering kali mencerminkan adanya penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang terealisasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Masalah ini seringkali muncul akibat adanya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif (Abdullah, 2012a). Perilaku oportunistik ini dapat berupa pengambilan keputusan anggaran yang tidak berdasarkan pada prioritas kebutuhan riil masyarakat atau daerah, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi yang dapat merugikan efisiensi pengelolaan anggaran tersebut (Parwati et al., 2015).

Dalam konteks pemerintah daerah, ketidaktepatan anggaran bisa terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti perencanaan yang tidak akurat, pemahaman yang kurang tentang kebutuhan pembangunan yang mendesak, atau bahkan adanya manipulasi anggaran untuk tujuan tertentu (Handayani et al., 2022). Sebagai contoh, beberapa pihak mungkin lebih fokus pada pencapaian target anggaran yang tampaknya lebih realistis atau menguntungkan secara politik, daripada memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi pada tingkat perencanaan anggaran yang tidak cukup memperhatikan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, serta ketidakmampuan dalam memprediksi kondisi ekonomi atau sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas anggaran (Edtiyarsih, 2023).

Di sisi lain, salah satu indikator lain yang dapat menunjukkan ketidakterserapan anggaran yang optimal adalah SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), yang jika dibiarkan tinggi, mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam alokasi dan penggunaan anggaran. SiLPA yang tinggi bisa menjadi gambaran adanya dana yang tidak terpakai dalam suatu tahun anggaran, yang seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Ketidakterserapan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya perubahan kebijakan yang mendadak, keterlambatan dalam pelaksanaan program, atau ketidakmampuan dalam merespons dinamika yang terjadi selama periode anggaran (Abdullah, 2012b). Akibatnya, SiLPA yang tinggi dapat berujung pada keterbukaan dalam struktur anggaran pada tahun berikutnya, di mana pemerintah daerah mungkin akan mengurangi alokasi anggaran untuk beberapa program, atau justru meningkatkan anggaran di sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak atau berpotensi menimbulkan ketidakpuasan politik.

Selain itu, pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana public (Junita, 2015). Pemerintah daerah yang tidak dapat mengelola anggaran secara efisien akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, baik dari lembaga legislatif maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Asrizal et al., 2023). Seiring dengan hal ini, pentingnya peningkatan kapasitas dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan daerah menjadi sangat relevan, untuk meminimalkan adanya kesalahan perencanaan, ketidakefektifan penggunaan anggaran, serta praktik penyimpangan yang merugikan Masyarakat (Wibowo, 2023).

Fenomena tersebut terlihat jelas di beberapa kabupaten/kota di Aceh selama periode 2018-2022, yang mana anggaran yang disusun seringkali tidak sesuai dengan realisasinya. Misalnya, pada tahun 2019, Kabupaten Aceh Selatan mengalami perbedaan signifikan antara anggaran belanja yang disusun dengan realisasi belanja yang terjadi, yang menciptakan SiLPA yang cukup tinggi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Begitu pula di Kota Banda Aceh yang mengalami over-estimasi anggaran pada sektor belanja publik, yang mengindikasikan adanya potensi ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2021). Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, baik dalam hal pendapatan maupun belanja, dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran di pemerintah daerah.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti varian anggaran dan SiLPA. Abdullah dan Nazry (2014) menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, pemerintah cenderung menentukan target anggaran di bawah potensi pendapatan yang sebenarnya, yang berpotensi menciptakan varian anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Callahan dan Waymire (2007) serta Aminah dan Lindrianasari (2013) menunjukkan bahwa varian anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, SiLPA yang tinggi juga menunjukkan ketidakefisienan dalam anggaran pengelolaan, yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah (Ramadanti, 2019).

Isu utama yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh varian anggaran dan SiLPA terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah, terutama dalam konteks daerah yang memiliki tantangan struktural dan sumber daya yang terbatas, seperti di Aceh. Dalam kurun waktu 2018-2022, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam varian anggaran dan SiLPA di berbagai kabupaten/kota di Aceh, yang berpotensi mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Isu ini menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pembangunan daerah (Putra & Amran, 2023).

Penelitian ini mengangkat Teori Keagenan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan hubungan antara varian anggaran belanja, SiLPA, dan kinerja anggaran pemerintah daerah. Teori ini menjelaskan adanya asimetri informasi antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat/pemegang saham), yang berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik, seperti manipulasi anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran yang tidak efisien dapat terjadi akibat masalah keagenan antara eksekutif dan legislatif, serta ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran (Halim & Abdullah, 2006).

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Keagenan untuk mengkaji pengaruh varian anggaran belanja dan SiLPA terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh, dengan fokus pada periode 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perencanaan dan pengawasan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, permasalahan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara variabel independen, yaitu varian anggaran belanja dan SiLPA, terhadap variabel dependen, yaitu kinerja anggaran pemerintah daerah. Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa varian anggaran belanja dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh pada periode 2018-2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Aceh dengan fokus pada peran varians anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) antara tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah disusun, serta menganalisis hubungan antara variabel

independen, yaitu varians anggaran dan SiLPA, dengan variabel dependen yang terdiri dari kinerja anggaran/keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Keuangan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan pengumpulan data sekunder yang bersifat homogen, sehingga memudahkan komunikasi antar kabupaten/kota di Aceh.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Keuangan daerah, yang memuat informasi mengenai anggaran belanja, realisasi anggaran belanja, dan SiLPA dari masing-masing kabupaten/kota. Untuk mengukur kinerja anggaran/keuangan pemerintah daerah, digunakan empat rasio utama, yaitu kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Rasio efisiensi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran, rasio efektivitas mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target pendapatan, dan rasio efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan yang ditargetkan. Varian anggaran dihitung sebagai selisih antara anggaran belanja yang direncanakan dan anggaran belanja yang terealisasi. Sedangkan SiLPA, yang merupakan selisih lebih realisasi antara anggaran pendapatan dan pengeluaran, dihitung dengan mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh varians anggaran dan SiLPA terhadap kinerja anggaran, dengan perangkat lunak EViews 13. Uji korelasi juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan signifikan antara varian anggaran dan SiLPA dengan kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh. Uji signifikansi dan koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi kinerja anggaran pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 berikut ini memberikan gambaran statistik untuk data yang telah diolah variabel bebas dan variabel terikat dengan jumlah objek yang dianalisis (N) sebanyak 114 unit analisis. Kinerja anggaran merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan varian anggaran belanja dan SiLPA merupakan variabel independen.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	KA	VAB	SiLPA
Mean	5.60E+10	9.59E+10	6.20E+10
Median	4.86E+10	8.79E+10	4.93E+10
Maximum	2.58E+11	6.61E+11	4.24E+11
Minimum	1.66E+09	1.17E+10	1.66E+09
Std. Dev.	4.66E+10	7.30E+10	6.09E+10
Skewness	1.213448	4.466280	2.473933
Kurtosis	4.936991	33.26489	13.26755
Jarque-Bera	45.79837	4729.834	617.0441
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	6.38E+12	1.09E+13	7.07E+12
Sum Sq. Dev.	2.45E+23	6.02E+23	4.19E+23
Observations	114	114	114

Hasil Pengolahan EViews 13

Berdasarkan hasil tabel deskriptif statistik dari variabel KA (Kinerja Anggaran), VAB (Varian Anggaran Belanja), dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dapat memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis menggunakan 114 observasi untuk masing-masing variabel.

- Rata-rata (mean) Kinerja Anggaran sebesar $5.60E+10$, yang menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi. Nilai tengah atau median sebesar $4.86E+10$ menunjukkan bahwa setengah dari kabupaten/kota di Aceh memiliki kinerja anggaran yang lebih rendah daripada nilai rata-rata, sedangkan setengah lainnya memiliki kinerja anggaran yang lebih tinggi. Nilai maksimum yang tercatat adalah $2.58E+11$, yang jauh lebih tinggi dari nilai minimum sebesar $1.66E+09$, menunjukkan adanya ketidakteraturan yang cukup besar dalam kinerja anggaran antar kabupaten/kota yang berbeda. Standar deviasi sebesar $4.66E+10$ menunjukkan bahwa data kinerja anggaran cukup lebar di sekitar nilai rata-rata. Skewness sebesar 1.21 mengindikasikan distribusi data yang condong ke kanan (positif skew), yang berarti bahwa sebagian besar kabupaten/kota memiliki kinerja anggaran yang lebih rendah dengan beberapa kabupaten/kota yang memiliki kinerja anggaran yang jauh lebih tinggi. Kurtosis yang sebesar 4.94 menunjukkan adanya puncak distribusi yang lebih tinggi dari distribusi normal, menandakan adanya konsentrasi nilai yang cukup besar pada angka-angka tertentu.
- Varian anggaran belanja menunjukkan nilai rata-rata sebesar $9.59E+10$, dengan nilai median yang lebih rendah di $8.79E+10$, yang menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata dan nilai tengah, dengan kecenderungan data yang lebih tinggi dari rata-rata. Nilai maksimum untuk varians anggaran belanja adalah $6.61E+11$, jauh lebih tinggi daripada nilai minimum $1.17E+10$, yang menunjukkan adanya keleluasaan dalam mengklik anggaran belanja antar daerah. Standar deviasi sebesar $7.30E+10$ menunjukkan tingkat variasi yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Skewness sebesar 4.47 menandakan distribusi data yang sangat miring ke kanan, yang menandakan bahwa sebagian besar data berada pada kisaran yang lebih rendah dengan beberapa kabupaten/kota yang memiliki varian anggaran belanja yang jauh lebih tinggi. Kurtosis yang sangat tinggi, yaitu 33.26, menunjukkan distribusi yang sangat tajam dengan banyaknya nilai yang berada jauh di atas rata-rata, yang mungkin disebabkan oleh adanya nilai ekstrem yang signifikan.
- Rata-rata untuk SiLPA tercatat sebesar $6.20E+10$, sedangkan median berada pada $4.93E+10$, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Aceh memiliki SiLPA yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Nilai maksimum SiLPA adalah $4.24E+11$, sementara nilai minimum hanya $1.66E+09$, yang menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar daerah terkait sisa lebih banyak pembiayaan anggaran. Standar deviasi SiLPA sebesar $6.09E+10$ menunjukkan adanya penyebaran yang cukup luas pada data tersebut. Skewness sebesar 2.47 menunjukkan distribusi yang condong ke kanan, berarti sebagian besar kabupaten/kota memiliki SiLPA yang lebih rendah dengan beberapa kabupaten/kota memiliki SiLPA yang jauh lebih tinggi. Kurtosis yang tercatat sebesar 13.27 menunjukkan distribusi data yang lebih tajam dan lebih ringkas pada nilai tertentu, mirip dengan distribusi varians anggaran belanja.

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil olah data menghasilkan persamaan atau model regresi linier berganda, koefisien determinasi, standar error dan Prob. Signifikansi. Tabel 2 berikut menyajikan informasi tentang kebutuhan minimal penyajian hasil penelitian:

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.78E+10	6.14E+09	6.164090	0.0000
VAB	0.104712	0.046271	2.263003	0.0262
SiLPA	0.131113	0.060010	2.184853	0.0317
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.786505	Mean dependent var	5.60E+10	
Adjusted R-squared	0.716178	S.D. dependent var	4.66E+10	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Pengolahan EViews 13

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan perangkat lunak EViews 13 dengan metode Panel Least Squares (PLS), ditemukan bahwa Varian Anggaran Belanja (VAB) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Anggaran (KA) pada seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Koefisien untuk VAB sebesar 0.1047 dan untuk SiLPA sebesar 0.1311, yang menunjukkan bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggaran. Hal ini didukung dengan p-value yang lebih kecil dari 0,05 untuk kedua variabel, yang menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan terhadap KA. Dengan demikian, hipotesis pertama dan kedua diterima, yang berarti bahwa pengelolaan anggaran yang baik, baik dalam hal varian anggaran belanja maupun SiLPA, akan memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah.

Model yang digunakan memiliki R-squared sebesar nilai 0. sebesar 0.7865, yang menunjukkan bahwa sekitar 78.65% variasi dalam Kinerja Anggaran dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model ini, yakni VAB dan SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan dapat menjelaskan sebagian besar variabilitas Kinerja Anggaran. F-statistic sebesar 11.18345 dengan p-value 0.000000 juga menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan kata lain, hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kuat dan tidak terjadi secara kebetulan.

Selanjutnya persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$KA = 3.78E+10 C + 0.104712 VAB + 0.131113 SiLPA + \varepsilon$$

Dimana KA adalah Kinerja Anggaran, VAB adalah Varian Anggaran Belanja, dan SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi Kinerja Anggaran berdasarkan dua variabel independen tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan varians anggaran belanja dan SiLPA yang baik dapat meningkatkan Kinerja Anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Aceh untuk lebih memperhatikan pengelolaan anggaran, baik dalam hal perencanaan maupun pengawasan, guna mencapai kinerja anggaran yang optimal. Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor lain dapat mempengaruhi Kinerja Anggaran, VAB dan SiLPA merupakan faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pencapaian sasaran anggaran di daerah tersebut.

Pengaruh Varian Belanja Daerah terhadap Kinerja Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian anggaran belanja berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar atau kecilnya varian anggaran belanja dapat berdampak pada pencapaian kinerja anggaran daerah di kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, koefisien arah positif sebesar 0,104712 menunjukkan bahwa peningkatan varian anggaran belanja cenderung meningkatkan kinerja anggaran.

Secara teoritis, varian anggaran belanja mencerminkan tingkat disiplin fiskal pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Jika varian anggaran terlalu tinggi, hal ini dapat menunjukkan ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, baik dalam aspek estimasi pendapatan maupun alokasi belanja (Ramadanti, 2019). Namun, dalam hasil penelitian ini, pengaruh positif dari varian anggaran belanja terhadap kinerja anggaran dapat diinterpretasikan sebagai indikasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan riil selama tahun anggaran berjalan (Sri Devi et al., 2024).

Dalam konteks pemerintah daerah di Aceh, faktor-faktor seperti perubahan prioritas kebijakan, keterlambatan dalam proses administrasi anggaran, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program dapat menjadi penyebab utama munculnya varian anggaran belanja (Putra & Amran, 2023). Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu mengelola varian anggaran dengan baik, misalnya melalui evaluasi berkala dan penyesuaian strategi pelaksanaan anggaran, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran.

Lebih lanjut, implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Aceh perlu meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran agar varian anggaran belanja tetap berada pada tingkat yang optimal. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan dalam realisasi anggaran dapat dikendalikan dan tidak berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah (Prabowo, 2018).

Dengan adanya hubungan positif ini, dapat disimpulkan bahwa varian anggaran belanja bukan hanya sekadar indikasi ketidaktepatan perencanaan, tetapi juga dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan fleksibilitas fiskal guna mencapai kinerja anggaran yang lebih baik.

Pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dalam suatu tahun anggaran (Husna et al., 2023). Keberadaan SiLPA dapat mencerminkan berbagai aspek dalam pengelolaan anggaran, seperti efisiensi dalam penggunaan belanja, perencanaan anggaran yang tidak optimal, atau adanya keterlambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan (Mardiasmo, 2018).

Dalam penelitian ini, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran di kabupaten/kota pemerintah daerah Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, yang berada di bawah ambang batas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara SiLPA dan kinerja anggaran tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki hubungan yang nyata. Selain itu, koefisien arah sebesar 0.131113 dengan tanda positif menunjukkan bahwa peningkatan SiLPA berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggaran.

Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa SiLPA yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah yang mampu mengendalikan pengeluarannya cenderung memiliki kinerja anggaran yang lebih baik (Kartika, 2020). Namun, tingginya SiLPA juga dapat mengindikasikan adanya ketidakefisienan

dalam penyerapan anggaran, sehingga menghambat efektivitas belanja dalam mendukung pembangunan daerah (Niansyah & Biswan, 2018).

Implikasi dari hasil penelitian ini mengarah pada pentingnya peningkatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih optimal di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Aceh perlu memastikan bahwa SiLPA yang tinggi bukan hanya merupakan akumulasi dari anggaran yang tidak terserap, tetapi juga mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan belanja dan pencapaian target Pembangunan (Niansyah & Biswan, 2018). Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap perencanaan dan realisasi anggaran perlu dilakukan agar kinerja anggaran tetap optimal dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Ramadanti, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa SiLPA memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja anggaran, tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya SiLPA di berbagai daerah. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat merancang strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik, sehingga peningkatan kinerja anggaran tidak hanya sekadar diukur dari angka SiLPA, tetapi juga dari efektivitas belanja dalam mendukung pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh dengan memperhatikan peran varians anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan analisis regresi panel yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik varians anggaran belanja (VAB) maupun SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Variabel VAB menunjukkan koefisien sebesar 0.1047, sedangkan SiLPA memiliki koefisien sebesar 0.1311. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam kedua variabel tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki R-squared sebesar 0.7865, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 78.65% variasi dalam kinerja anggaran. Dengan demikian, model ini dapat dianggap baik dalam memprediksi kinerja anggaran berdasarkan variabel VAB dan SiLPA. Uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan p-value yang sangat kecil (0.0000), yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kuat.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang baik terhadap varians anggaran dan SiLPA dapat memperbaiki kinerja anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Aceh untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, untuk memastikan pencapaian kinerja anggaran yang optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik di bidang pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam konteks peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah di Aceh.

SARAN

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengelolaan Varians Anggaran (VAB): Pemerintah daerah di Aceh perlu memperkuat pengelolaan anggaran dengan memperhatikan varians anggaran belanja. Pemerintah daerah sebaiknya lebih berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran agar varians yang terjadi dapat diminimalisir, dan tidak mengganggu pelaksanaan program serta kegiatan. Dengan demikian, peningkatan kinerja anggaran dapat tercapai lebih optimal.

2. Optimalisasi Pengelolaan SiLPA: SiLPA yang besar dapat mencerminkan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk meminimalisir SiLPA dengan memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta pengendalian terhadap sisa anggaran, harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Anggaran: Agar pengelolaan anggaran daerah semakin efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran. Pelatihan dan pendidikan tentang manajemen anggaran, pengendalian anggaran, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat membantu meningkatkan kinerja anggaran daerah.
4. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat: Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan evaluasi terhadap kinerja anggaran yang telah dilaksanakan harus diperketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal, serta meminimalisir penyimpangan atau kebocoran dalam penggunaan anggaran.
5. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran: Pemerintah daerah di Aceh disarankan untuk lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, proses perencanaan, pengalokasian, serta pelaporan anggaran akan menjadi lebih transparan dan akurat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan kinerja anggaran pemerintah daerah di Aceh dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012a). *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/54499
- Abdullah, S. (2012b). *Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah ~ Sebuah Pengantar*. <https://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varians-anggaran-pendapatan-daerah/>
- Aminah & Lindrianasari. (2013). Accountability and Financial performance of local government in Indonesia. The First International Conference on Law, Business and Government.
- Asrizal, A., Hasran, H., & Rahman, R. (2023). Relasi Eksekutif dalam Penyelenggaraan Tonomi Daerah di Takalar. *Journal of Government Insight*, 3(1), 252–264. <https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.519>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta: BPK.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Laporan Tahunan BPKP 2021*. Jakarta : BPKP.
- Callahan, C.M. & Waymire, T.R. (2007). An Examination Of The Effect Of Budgetary Control On Performance : Evidence From Cities. AAA 2008 MAS Meeting Paper
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1)(February), 53–64.

- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrua! Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Husna, M., Yusmita, F., & Abdullah, S. (2023). The Effect of Regional Genuine Income, Profit-Sharing Funds, General Allocation Funds, and Budget Return Calculations on Official Travel Expenditure. *International Journal of Social Health*, 2(5), 295–305. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i5.36>
- Callahan, C.M. & Waymire, T.R. (2007). An Examination Of The Effect Of Budgetary Control On Performance : Evidence From Cities. AAA 2008 MAS Meeting Paper
- Junita, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 4(2), 366–375.
- Kartika, J. & A. (2020). Peran SilPA Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(November), 258–270. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v11i1.237>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Maulana,
- Niansyah, F. I. W., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan pada KPP Badan dan Orang Asing). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 348–363. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/79%0Ahttps://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/download/79/85>
- Parwati, S. M., Budiasih, I. G. A. N., & Astika, I. B. P. (2015). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 127–133.
- Prabowo, T. J. W. (2018). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 30(1), 2–21. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2018-002>
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192–213. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819>
- Ramadanti, V. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*, 1–10.
- Sri Devi, Arini Aisyahfira Wijaya, Indah Doanita Hasibuan, Putri Dina, & Adelia Andina. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Simalingkar. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 108–119. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i2.256>
- Wibowo, A. P. (2023). *Pengaruh perencanaan anggaran, partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dimoderasi oleh standar biaya (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten klaten)*.